

LAPORAN TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER GIGI PRAKTIK MANDIRI YANG MENOLAK TINDAKAN PADA PASIEN YANG TIDAK DIVAKSINASI COVID-19 DI KABUPATEN CIREBON

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Pasca Sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum Kesehatan



Diajukan oleh:
Erni Susanty Tahir
NIM: 20.C2.0070

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER GIGI PRAKTIK
MANDIRI YANG MENOLAK TINDAKAN PADA PASIEN YANG
TIDAK DIVAKSINASI COVID-19 DI KABUPATEN CIREBON**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Pasca Sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum Kesehatan



Diajukan oleh:
Erni Susanty Tahir
NIM: 20.C2.0070

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2023

ABSTRAK

Transmisi penularan Covid-19 sangat cepat dan membuat banyak tenaga medis meninggal termasuk dokter gigi sehingga banyak dokter gigi yang menolak tindakan pada pasien yang belum divaksinasi Covid-19 serta menutup tempat praktik mandirinya sehingga hal ini justru menempatkan dokter gigi pada posisi sebagai pemikul berbagai kewajiban dengan sederet sanksinya jika dokter gigi tidak menjalankan pelayanan kesehatan dengan baik dan benar, dan hanya mementingkan diri sendiri.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19, menjelaskan upaya organisasi profesi dan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menyiapkan regulasi untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 dan merumuskan konsep pengaturan regulasi yang ideal dalam melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejatinya dokter gigi yang menolak pemberian tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19 merupakan sebuah hak yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan. Tidak ada upaya yang telah dilakukan oleh Organisasi Profesi dan Pemerintah Daerah dalam menyiapkan regulasi untuk melindungi dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19, dan prinsipnya hanya menjalankan peraturan yang ada dari Pemerintah Pusat. Konsep regulasi yang ideal adalah dengan mengupayakan pembentukan regulasi secara baik. Selain itu konsep *Omnibus Law* dapat diterapkan untuk mengurangi tumpang tindih regulasi, sehingga dibutuhkan amandemen peraturan perundang-undangan khusus mengatur perlindungan hukum dokter gigi praktik mandiri yang menolak tindakan pada pasien yang tidak divaksinasi Covid-19.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Dokter Gigi Praktik Mandiri, Vaksin Covid-19

ABSTRACT

The Covid-19 spread across the globe through air contact in such a rapid transmission from one fallen patient to another, causing lethal impacts among a great number of medical personnel, including indeed the dentists. One of the immediately-cautious responses that the dentists made— as a preventive effort to save their life from such the on-going chaotic and horrible circumstance— was to take a stance for not wading into any procedure of dental health care that allowed a direct and risky interaction with patients who had not been vaccinated against the Covid-19. Some of them even decided to close their private owned clinics. Such standpoint unfortunately created a popular opinion that it was as though the dentists had been those needed to be blame for breaching the ethics, and thus sanctions and punishments must have been handed to them. What is worse, the dentist.

The purposes of this study is to make a close examination on the existing regulations governing the legal protection for private dentists who opt to refuse to take action on patients who are not vaccinated against the Covid-19; to draw explanation on the strategy that the professional organizations and the Cirebon Regency government might have made in preparing regulations ensuring a protection of the private dentists who turn down an action on patients who are not vaccinated against the Covid-19; and also to formulate the concept of an ideal regulatory arrangement in protecting the private dentists who refuse to take action on patients who are not vaccinated against the Covid-19. This study uses a research method of an empirical juridical approach with secondary and primary data collection. The research results are then analyzed qualitatively

The results of the study indicate that in fact dentists who refuse to provide treatment to patients who are not vaccinated against the Covid-19 have done a righteous action and that such right must be fulfilled by statutory regulations. This study also finds out that there were no obvious efforts that Professional Organizations and Regional Governments should have made in preparing regulations to protect the private dentists who refused to take action on patients who are not vaccinated against the Covid-19, and instead they just tried to make top-down parameters to comply as closes as with Central Government's existing laws and regulations. This study comes to an argument that in order to establish an ideal regulatory concept requires an endeavour of regulation process. Moreover, the *Omnibus Law* can lend itself to be adopted as a legal approach to reduce the overlapped regulations. In thay way, it requires a special laws and regulations in order to provide legal protection to the private dentists who refuse to take procedures of dental cares to patients who are not vaccinated against the Covid-19.

Keywords: Legal Protection, Private Dentist, Covid-19 Vaccine.